



ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

PERKARA : Polda Kalbar melanjutkan gelar perkara atas dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) Kalbar dari APBD tahun anggaran 2006 hingga tahun 2009.

SPJ Fiktif dalam Laporan Keuangan

Terungkap Saat Gelar Perkara Bansos

PONTIANAK-Polda Kalbar melanjutkan gelar perkara atas dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) Kalbar dari APBD tahun anggaran 2006

hingga tahun 2009 yang menyeret mantan Gubernur sekaligus Ketua Umum KONI Kalbar Usman Ja'far (UJ) dan mantan Ketua DPRD Kalbar Zulfadhli (Zul).
Gelar perkara langsung dipimpin Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto, Waka Polda Kombes Pol Joko Irianto, dan Irwasda serta Kabidkum Polda Kalbar. "Hari

ini dilakukan gelar perkara. Saya ingin memastikan dan menekankan kepada para penyidik untuk melakukan suatu penyidikan yang cermat dan teliti," kata Arief Sulistyanto, kemarin. Dikatakan Arief, sejauh ini pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa dokumen,

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



SPJ Fiktif dalam Laporan Keuangan

Sambungan dari halaman 1

bukti petunjuk serta keterangan saksi-saksi. Sudah 21 saksi dilakukan pemeriksaan, diantaranya dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, sebanyak lima orang, KONI Kalbar 6 orang, Dewan Pembina Fakultas Kedokteran (DPKF) Untan 3 orang, Sekretaris Dewan (DPRD Kalbar) 6 orang dan satu orang saksi ahli dari Dirjen Keuangan Daerah. "Sementara alat bukti yang dikumpulkan para penyidik sudah mencukupi," kata Arief.

Selanjutnya, pihaknya akan membuat sebuah konstruksi hukum dari konstruksi perbuatan yang terjadi di dalam proses penggunaan bansos 2006-2009 itu. Dari konstruksi perbuatan itu, konstruksi hukum yang akan diterapkan oleh penyidik juga harus tepat sehingga dari perbuatan dan konstruksi hukum ini, maka nanti disusun konstruksi pembuktian untuk membuktikan berdasarkan alat bukti yang cukup dan benar serta didukung dengan informasi dan saksi-saksi.

"Perkara ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan KONI dan Dewan Pembinaan Fakultas Kedokteran Untan. Dari perbuatan ini, maka akhirnya, KONI dan DPKF Untan tidak bisa mencapai target dari tujuan yang ditetapkan," lanjutnya.

Dalam gelar perkara tersebut, mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri itu secara gamblang membeberkan kronologis aliran Bansos dari APBD tahun anggaran 2006 sampai 2009.

Dalam tempo empat tahun berturut-turut (2006-2009), APBD Provinsi Kalbar mengalokasikan sejumlah dana untuk KONI dan Dewan Pembinaan Fakultas Kedokteran. Dimana tahun 2006, alokasi anggaran Bansos untuk KONI sebesar Rp12 miliar dan anggaran Bansos untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan sebesar Rp5 miliar.

Pada tahun 2007, alokasi anggaran Bansos untuk ang-

garan Bansos KONI Kalbar Rp13,25 miliar dan anggaran Bansos Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Rp5 miliar.

Pada tahun 2008, alokasi anggaran Bansos KONI Kalbar sebesar Rp29 miliar (bersumber dari APBD Rp19 miliar dan APBDP Rp 10 miliar) dan anggaran Bansos untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Rp 5 miliar.

Pada tahun 2009, anggaran Bansos KONI Kalbar Rp9,5 miliar. "Penggunaan dana ini tidak semuanya benar. Dalam pertanggungjawaban keuangan kami menemukan fiktif. Berupa surat perintah jalan (SPJ) fiktif. Dokumen sudah kami amankan semua," kata Arief.

Dana Bansos tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan ke KONI dan Dewan Fakultas Kedokteran Untan, melainkan dipinjam sebagian oleh Usman Ja'far selaku Gubernur Kalimantan Barat periode 2003-2008 sekaligus Ketua Umum KONI dan Ketua Umum Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan dan kepada Zulfadli selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat sekaligus selaku Wakil Ketua KONI melalui Sekda Provinsi Kalbar Syakirman.

"Ketua DPRD Provinsi Kalbar mengajukan pinjaman secara lisan kepada Sekda kalbar. Sekda mengajukan permohonan kepada gubernur selaku ordinator dan memberikan persetujuan. Setelah disetujui, kemudian diproses. Keluarlah uang itu dan diberikan kepada orang yang meminjam ini. Ini berlangsung sampai periode 2009. Setiap tahun, orangnya ada yang sama, ada juga yang berbeda. Setelah dipinjam ada yang mengembalikan, ada yang masih kurang. Sebagian lagi masuk ke kedua tersangka ini (UJ dan Zul)," beberrnya.

Menurut Arief, dalam pengelolaan keuangan ada ketentuan-ketentuan administrative, diatur tentang prosedur, bagaimana pengelolaan keuangan. "Ada syarat-syarat administratif. Apabila sesuai dengan prosedur maka tidak akan

terjadi penyimpangan. Tetapi yang terjadi, penyimpangan atas prosedur ini. Proses ini tidak dibenarkan. Begitu uang dikeluarkan tidak sebagaimana peruntukannya," katanya.

Berdasarkan penghitungan kerugian negara (PKN), BPK RI terhadap penyimpangan bansos APBD tahun anggaran 2006-2009 ini, sebesar Rp20 miliar. "Tentu tersangkanya tidak hanya dua saja. Tetapi saya pastikan masih ada yang lain. Nah ini nanti yang akan kami ungkap," terangnya.

Dari 21 saksi yang diperiksa Polda Kalbar, satu diantaranya adalah Ir. Rudy Bachtiar, yang disebut-sebut sebagai sekretaris pribadi Usman Ja'far. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini juga dituding telah mengambil uang tunai pinjaman dari Sekda Syakirman dan Asisten III Kamaruzaman.

Ditemui secara terpisah, Rudy Bachtiar membantah, dirinya selaku sekretaris pribadi Usman Ja'far. "Saya ini kan mantan Kepala Dinas PU, *masakan* jadi sekretaris pribadi?" katanya setengah bertanya.

Menurut Rudy, dirinya juga tidak pernah menerima atau mengambil uang tunai atau apapun dari Sekda Syakirman dan Asisten III Kamaruzaman. "Saya tidak mengambil uang itu," lanjutnya.

Namun demikian, dirinya tidak menampik bahwa ia pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Bansos tersebut. Namun dalam pemeriksaan sebagai saksi itu, ia mengaku tidak tahu menahu tentang kucuran dana Bansos. "Memang saya pernah diperiksa sebagai saksi satu kali. Pemeriksaannya seputar bansos. Waktu itu, memang saya tidak mengetahui," kata pria yang saat ini menjabat sebagai staf sekretariat staf ahli Gubernur Kalimantan Barat itu.

Terkait pembangunan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (Untan), nama Ir Rudy Bachtiar masuk dalam anggota tim pembangunan. Namun ia mengaku bukan sebagai pengguna anggaran. (arf)